

KEPEDULIAN CIVIL SOCIETY DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEJAK DINI

“*Studi Kasus Pondok Pesantren Insan Mulia Kec. Banguntapa, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*”

Rijal Ramdani

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
rijalramdani@umy.ac.id

ABSTRAK

Paper ini akan mendiskusikan isu penyelenggaraan pendidikan agama sejak dini yang dilakukan oleh kekuatan civil society melalui Pondok Pesantren Insan Mulia. Dimana Pondok Pesantren tersebut digagas oleh Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Banguntapan Utara dan digerakan oleh aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Di dalam paradigma lama, idealnya bahwa fasilitasi Pendidikan tersebut dilakukan oleh institusi Negara, akan tetapi dalam paradigma institusi baru (new-institutioanalism), peran tersebut bisa diambil alih oleh kekuatan civil society ketika institusi masyarakat tersebut sudah kuat. Hilangnya peran negara tersebut tidak berarti berkonotasi negative, justru hal tersebut bisa dimaknai sebagai hubungan kerjasama dalam sekema collaborative dan good governance. Bagaimanakah pola pengambil alihan peran yang dimaknai sebagai collaborative dan good governance tersebut? Dan, motivasi dan latar belakang apakah yang mendorong kekuatan civil society tersebut mau mengambil alih peran dari institusi negara? Paper ini akan mengelaborasinya lebih lanjut dengan data empiris berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Sejak Dini, Civil Society, Good Governance

PENDAHULUAN

Selama ini, pendidikan agama terkadang dinomor duakan baik oleh orang tua maupun pemerintah. Dimana orang tua jauh lebih banyak memberikan proporsi waktu bagi anak untuk les atau privat Bahasa Inggris, music, dan matematika. Padahal pendidikan agama sangat penting dilakukan sejak usia dini karena akan mampu membentuk karakter dan kepribadian anak untuk memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur, toleransi, senang membantu, dan memiliki sopan santun. Sebagai contoh, mengakarnya tindakan korupsi baik yang dilakukan oleh elite politik maupun pejabat birokrasi dan tingginya peredaran- pengkonsumsian narkoba disinyalir merupakan dampak dari minimnya pengenalan nilai- nilai agama sejak dini. Tugas tersebut sebetulnya berada di pundak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Namun kurikulum yang disusun oleh Kementerian Pendidikan selama ini, di setiap jenjang pendidikan Dasar, lebih cenderung memproporsikan mata pelajaran pendidikan agama sebagai kelas kedua setelah mata pelajaran lainnya (Republika, 05/11/2012).

Di sisi lain Kementerian Agama pun tidak memberikan perhatian yang memadai, selama ini program-program dari Kementerian Agama hanya bersifat konvensional, seperti dengan menyelenggarakan pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyah. Padahal karakteristik masyarakat modern yang terkonsentrasikan di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah penyangga kota sama sekali tidak memiliki ketertarikan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang berlabel agama. Sehingga ada ruang kosong yang tidak difasilitasi dan diperhatikan oleh Negara dalam pendidikan agama tersebut. Selama ini ruang kosong tersebut diisi oleh kekuatan civil society, seperti salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Insan Mulia di Kampung Plakaran, Desa. Baturetno Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (yang digagas oleh Sekretaris PCM Banguntapan Utara), yang menyelenggarakan pendidikan agama bagi anak-anak usia dini secara gratis. Dengan jumlah peserta didik yang mencapai 75 anak, dibantu 5 orang asatidz (tenaga pengajar), dan mempergunakan 4 kelas telah secara mandiri berjalan selama 1 tahun. Kepedulian tersebut patut diapresiasi karena bisa menjadi *rule of model* bagi penyelenggaraan

pendidikan agama di tempat-tempat lainnya dan bisa menjadi bukti bahwa kekuatan civil society bisa bergerak mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh Negara.

Dalam prinsip *good governance* hal itu dimungkinkan untuk terjadi, mengingat *good governance* memberikan ruang partisipasi yang luas bagi actor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara, civil society, dan mekanisme pasar. Pembagian peran tersebut selain ditujukan untuk mewujudkan *check and balances* juga untuk mewujudkan sinergi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama (Dwiyanto, 2005). Maka dalam penelitian ini akan mencoba menggambarkan bagaimana sebetulnya peran yang dilakukan oleh civil society dalam penyelenggaraan pendidikan agama sejak dini tersebut? Dan apa factor yang melatar belakangi kepedulian civil society tersebut?

Untuk mendiskusikan isu tersebut, dalam paper ini, di bagian pertama akan dieksplorasi mengenai konsep *good governance*, civil society, dan hubungan di antara keduanya. Juga mengenai pentingnya pendidikan agama sejak dini. Kemudian akan dieksplorasi mengenai profil Pondok Pesantren Insan Mulia. Dan di bagian akhir akan didiskusikan mengenai bagaimana gambaran penyelenggaraan pendidikan agama sejak dini yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Insan Mulia sebagai bagian dari kekuatan civil society dan apa factor yang mendorong kepeduliannya tersebut.

METODE

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Insan Mulia, Kampung Plakaran, Desa Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, DIY. Dan adapun untuk waktunya dimulai sejak tanggal 23 Oktober – 10 November 2012.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap Pimpinan Pondok dan jajaran Asatidzah Pesantren Insan Mulia, melakukan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen yang ada, dan melakukan observasi di Pondok Pesantren Insan Mulia.

Teori Dan Konsep

1. Good Governance dan Civil Society

Konsep *Good Governance* yang oleh UNDP diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan yang baik mengandung makna bagaimana cara mendistribusikan kekuasaan, mengelola sumberdaya, dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat secara baik dan benar (Effendi, 2005). *Governance* sebagai pengganti dari istilah *government* dipahami sebagai otoritas yang mengendalikan ekonomi, politik dan administrasi untuk mengatur kepentingan public suatu Negara dalam setiap level. Mencakup mekanisme, proses dan institusi yang dengan keberadaannya bisa menjadi wadah bagi warga Negara dan kelompok kepentingan untuk mengartikulasikan kepentingannya dan memediasi perbedaan-perbedaan yang ada (UNDP, Tt).

Sementara *good governance* sendiri merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, keadilan, dan *rule of law*. Prinsip *good governance* mengedepankan bahwa prioritas politik, ekonomi, dan social, didasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat dan didengarnya suara kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan (UNDP, Tt). IIAS mendefinisikan *good governance* sebagai proses dimana berbagai unsur di dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan, dan keputusan tentang kehidupan public, serta pembungaan ekonomi dan social (Effendi, 2005). *Good governance* dibangun di atas tiga pilar yaitu; state, civil society, dan market. Dimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan tercapai apabila ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinergik. Dan interaksi tersebut akan terlaksana dengan baik apabila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, dan aturan yang pasti (Effendi, 2005).

Saat ini memang telah terjadi pergeseran paradigma konsep good governance yang mengarah pada *less government*. Dimana peran pemerintah dikehendaki untuk tidak terlalu dominan, maka muncul istilah *best government* adalah *less government* (Effendi, 2005). Sehingga wajar bila penyelenggaraan dan penyediaan layanan public kecenderungannya lebih banyak yang diserahkan kepada sector privat. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan praktek penyelenggaraan pemerintahan seperti yang telah dilakukan oleh Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru (Muhammad, 2007). Ketika Negara semakin meminimalisir perannya maka munculah kekuatan civil society untuk mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh Negara dalam upaya melakukan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat yang masih belum bisa mengakses layanan yang disediakan oleh sector privat. Dan hal tersebut tidaklah menjadi masalah, karena seperti yang dikemukakan UNDP bahwa good governance menuntut pada terjadinya sinergi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan sector Negara dan sector non negara dalam suatu urusan kolektive (Krina, 2003).

Civil society sendiri bisa dipahami sebagai bentuk pengelompokan social yang lebih kompleks dari keluarga, tetapi tidak terlalu kaku dan tidak terlalu formal seperti Negara. Sehingga terjadi solidaritas social, perasaan menjadi satu kesatuan dalam rasa sepenanggungan (Usman, 2001). Sementara Cohen dan Arato mendefinisikannya sebagai lingkup interaksi social di antara ekonomi dan Negara yang mencakup semua lingkup kekerabata (khususnya keluarga), lingkup berbagai perhimpunan (terutama yang bersifat sukarela), dan bentuk-bentuk komunikasi kemasyarakatan (Pabotinggi, 2001). Terdiri dari asosiasi-asosiasi yang tergabung di dalam organisasi kesukarelaan berdasarkan pada gender, bahasa, budaya, kelompok agama, amal, asosiasi bisnis, klub olah raga, dan organisasi social (Usman, 2001). Keterlahiran kekuatan civil society merupakan bagian dari kesadaran bahwa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan social melalui Negara tidak sederhana (Usman, 2001).

Begitupun dengan Alko-Cobbah (2006) yang mengatakan bahwa betapa pentingnya kerjasama yang dilakukan antara Negara dengan CSO's dalam penyediaan layanan publik. Kekuatan civil society sangat penting bagi terwujudnya good governance (Rajesh dan Ranjita, 2004). Karena seperti yang dikemukakan Jamse F Hollifield dan Calin Jilson, salah satu prasyarat menuju transformasi demokrasi adalah melalui penguatan civil society. Keberhasilan dan kegagalan demokrasi ditentukan oleh seberapa kuat kekuatan civil society (Pabotinggi, 2001). Sejalan dengan apa yang dikemukakan UNDP, dimana CSO memiliki tugas untuk ikut serta membangun kapasitas manusia. Karena CSO bisa menjadi jembatan antara kepentingan individu dengan Negara, dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan sector bisnis. Sekalipun idealnya memang baik state, sector privat, dan CSO berkontribusi terhadap pembangunan manusia dengan ikut terlibat di dalam proses politik, penyusunan peraturan, kegiatan ekonomi, dan penyelesaian masalah social, seperti mengurangi angka kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, perlindungan terhadap lingkungan, dan pemberdayaan perempuan (UNDP, Tt).

Di Indonesia sendiri ide civil society sudah lama tumbuh berkembang. Ide awalnya dilakukan dengan mengidentifikasi hak-hak masyarakat yang dirampas kemudian membangun kesadaran bahwa hak-hak itu harus dikembalikan (Usman, 2001). Mengingat apabila Negara terlalu kuat dan sector swasta terlalu dominan tetapi masyarakat dalam keadaan lemah maka akan terjadi stagnasi dan ketergantungan masyarakat terhadap pasar. Cita-cita yang ingin diwujudkan adalah tidak ada dominasi Negara dan tidak ada dominasi oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah (Usman, 2001). Oleh karenanya gerakan yang dilakukan civil society melalui CSO adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat baik di sector pendidikan, kesehatan, maupun sector-sektor yang lainnya.

Tanvir Anjum (2007) mengidentifikasi beberapa model relasi yang bisa terjadi antara CSO dengan Negara, yaitu: *Pertama*, model konfrontasi dimana kekuatan civil society sebagai bentuk protes terhadap kekuasaan absolute monarchy seperti yang terjadi abad ke-17 di eropa. *Kedua*, model otonomi, dimana kekuatan civil society tidak memiliki keterikatan dengan Negara dan juga tidak mendapatkan control dari institusi politik, sehingga ciri khas dari civil society adalah independensi.

Ketiga, model kolaborative atau assosional, dimana terjadi kolaborasi dan saling melengkapi antara kekuatan civil society dengan Negara, dan model inilah yang banyak berkembang di banyak Negara melalui NGO (Non-Government Organization) dan CSO. Dan *keempat*, model mediasi, dimana kekuatan civil society sebagai mediator atau penengah antara masyarakat dengan Negara atau antara masyarakat dengan sector privat.

2. Pentingnya Pendidikan Agama Sejak Dini

Pendidikan agama islam merupakan sesuatu yang esensial bagi seorang muslim karena akan menjadi pedoman dalam kehidupannya (*way of life*). Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini yang memisahkan ilmu pengetahuan agama dengan pengetahuan umum penanaman pendidikan islam sangat penting untuk dilakukan sejak dini. Karena memang hal itu juga merupakan perintah Allah SWT di dalam al-Qur'an dan juga merupakan sabda sebagai petunjuk dari baginda Muhammad SAW (Rizvi, 1993). Di sisi lain pendidikan agama sejak dini akan tertanam secara mendalam, seperti dalam pepatah belajar sejak kecil seperti mengukir di atas batu.

Ilmu pengetahuan dalam pandangan islam dibagi pada dua kategori yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya sangat penting untuk dipelajari, para ilmuan islam masa lalu, baik yang berada di Mesir, Baghdad, dan Cordova, bergelar ulama dan juga ilmuan. Seperti Ibnu Sina yang menulis kitab al-*isharat* dalam bidang filsafat dan juga menulis kita al-*Qonun fi al-thib* dalam bidang ilmu kedokteran yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa latin dan masih dijadikan sebagai rujukan di universitas-universitas ternama eropa sampai saat ini (Rizvi, 1993). Sehingga dengan kombinasi keulamaan dan ilmuan tersebut kelak akan menjadikannya ilmuan yang luas ilmunya dan juga halus perangai- budi pekertinya.

Batas usia Dini yang dikembangkan oleh Open Society Institute, sebuah lembaga yang bergerak dalam advokasi pendidikan islam di United Kingdom, adalah anak yang berkisar di bawah 16 tahun (www.quest-learning.org/BritishMuslims.pdf). Dan adapun hal yang terpenting untuk diajarkan pertama kali bagi anak usia dini dalam pendidikan agama islam adalah Al'qur'an. Mengingat Al-qur'an merupakan *the central revealed scripture of islam* atau rujukan utama ajaran agama islam (Afsaruddin, Tt). Untuk kemudian barulah sunnah nabi Muhammad SAW (Rizvi, 1993). Melalui keduanya aturan dan pandangan hidup seorang muslim akan terbentuk (Hamm, 2012). Di dalam Al'qur'an diajarkan nilai-nilai yang dibutuhkan manusia, seperti jujur (*amanah*), toleransi (*rahmatan lil alamin*), pemaaf (*afuwun*), mencintai ilmu pengetahuan (*hubbul ilmi*), dan sejuta nilai-nilai yang lainnya. Begitupun di dalam sunnah Muhammad, baik berupa perkataan ataupun sikapnya, seperti salah satunya Nabi mengatakan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya.

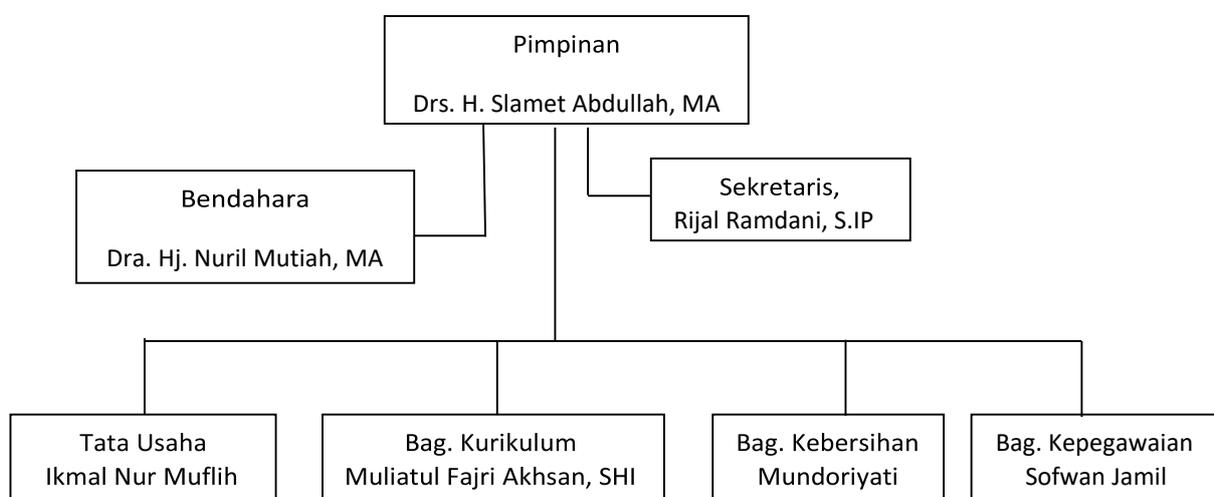
Seandainya pendidikan agama islam kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari institusi pendidikan formal Negara, maka bisa dilakukan melalui dua skema, yaitu: *Pertama*, melalui skema *the short-term solution*, dimana anak-anak islam bersekolah di sekolah umum yang berbasiskan pada science, tetapi tetap mengikuti pengajaran pendidikan agama islam di luar sekolahnya tersebut. Seperti yang dilakukan oleh keluarga-keluarga muslim di Amerika Utara. *Kedua*, *the long-term solution*, anak-anak islam disekolahkan di sekolah yang sudah mengkombinasikan kurikulum pendidikannya antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran islam secara seimbang (Rizvi, 1993).

Dengan demikian maka, dalam penelitian ini pendidikan agama islam sejak dini, berkisar di bawah usia 16 tahun, dipahami sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan, dengan tahapan pertama memberikan pengajaran Al'qur'an sebagai sumber utama ajaran islam. Karena di dalam Al'qur'an terdapat nilai-nilai yang akan membentuk kepribadian seorang muslim (*way of life*). Seandainya pendidikan agama islam kurang mendapatkan proporsi dalam system pendidikan formal maka solusinya bisa dilakukan dengan cara memberikan pelajaran tambahan non formal di luar sekolah atau memasukkan anak ke sekolah yang sudah memadukan kurikulum pendidikan agama islam dengan umum secara seimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pondok Pesantren Insan Mulia

Pondok pesantren Insan Mulia terletak di Kampung Plakaran, Rt 02, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Menempati tanah seluas 1500 m² yang disewa selama 15 tahun, terdiri dari 1 bangunan rumah dengan 5 kamar yang diperuntukkan untuk tempat tinggal tenaga pengajar, 4 ruang kelas yang diperuntukkan untuk proses belajar mengajar, 1 pendopo yang berfungsi sebagai tempat shalat berjamaah, dan terdapat 3 kamar mandi. Berdiri pada tanggal 10 Juli 2011 yang secara langsung diresmikan oleh Bupati Bantul Hj. Sriwidati (Ida Idham Samawy). Sampai saat ini sudah berusia 1,5 tahun, dengan jumlah peserta didik sebanyak 75 anak rata-rata berusia 06-13 tahun yang berasal dari kampung di sekitar kawasan Plakaran, Ironayan, Bumen, Ngipik, (Desa Baturetno), dan Kota Gede. Mayoritas merupakan anak Sekolah Dasar SDN Plakaran, SDN Baturetno, SDN Wiyoro, dan SDN Kota Gede. Terdiri dari 4 kelas, masing-masing kelas berjumlah 18-20 santri yang diampu oleh 5 tenaga pengajar, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Ke-5 tenaga pengajar tersebut merangkap juga sebagai pengurus dan pengelola pondok pesantren, dengan



kepengurusan sebagai berikut:

Berdirinya pondok pesantren Insan Mulia berangkat dari keprihatinan pendiri pondok pesantren, Ust. Drs. H. Slamet Abdullah, MA yang merupakan sekretaris PCM Banguntapan Utara, pada karakter kepemimpinan bangsa yang semakin memudar dengan banyaknya pejabat Negara dan politisi yang tersandung kasus korupsi dan memudarnya jiwa nasionalisme. Diperparah dengan rusaknya tatanan social, masyarakat yang mudah disogok, masih mengedepankan kekerasan dalam penyelesaian masalah, dan kurangnya sikap toleransi. Kondisi masyarakat plakaran sendiri secara ekonomis hampir 75 persennya tidak berpenghasilan tetap, dengan imej kampung sebagai wilayah basis Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu. Kondisi keluarga yang rusak dengan moralitas yang jauh dari nilai-nilai agama.

Ditambah dengan maraknya kasus perkelahian yang melibatkan remaja, banyaknya remaja yang terjerumus untuk menggunakan narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang, meminum minuman keras, dan terlibat pergaulan bebas. Hal itu dipandang merupakan dampak dari memudarnya pemahaman terhadap agama, dan nilai-nilai kebudayaan local sebagai *imun* yang bisa membentengi kepribadian remaja. Ditambah dengan kekeliruan system pendidikan di sekolah formal yang terlampaui menekankan pendidikan intelektual. Sehingga diperlukan penyediaan institusi yang bisa menanamkan nilai-nilai agama sejak dini terhadap generasi muda dan anak-anak. Diharapkan dengan berfokus pada anak dan remaja, kerusakan moral dan tatanan social yang dilakukan generasi tua bisa terputus jenjang keberlanjutannya¹.

Secara khusus Ust. Drs. H Slamet Abdullah, MA sekalipun berlatar belakang Muhammadiyah tetapi tidak memberikan brand Muhammadiyah bagi Pondok Pesantrennya dilatar belakangi oleh beberapa alasan: *Pertama*, sebagai strategi supaya pendidikan Agama Sejak Dini yang diselenggarakan supaya bisa diakses oleh berbagai latar belakang masyarakat, mengingat masyarakat di sekitar Plakaran dan Baturetno tidak semuanya bisa menerima paham Muhammadiyah. *Kedua*, Sebagai strategi untuk mengakses dana dari Donatur yang lebih luas tidak hanya dari yang berlatar belakang Muhammadiyah saja, mengingat selama ini jaringan dakwah Ust. Drs. H. Slamet Abdullah, MA berasal dari berbagai kalangan di DIY. *Ketiga*, alasan birokratis, dimana dalam prosedur pendirian Pondok apabila Pondok Pesantren ingin mendapatkan nomor pendirian secara resmi dari Departemen Agama terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus Perhimpunan Pondok Pesantren se-Kab. Bantul yang didominasi kepengurusannya oleh Ulama – Ulama Nahdatul Ulama, begitupun dengan pegawai Departemen Agama Kab. Bantul dan Provinsi DIY yang melakukan asesor didominasi oleh mereka yang berlatar belakang Nahdiyini, bahkan untuk mempermudah proses pendirian kurikulum pondok pun dirubah mengikuti mata pelajaran – mata pelajaran kitab-kitab yang diajarkan pondok Nahdiyini, hal ini sebagai bentuk strategi untuk mempermudah prosedur peresmian Pondok Pesantren. Sekalipun tidak menggunakan brand Muhammadiyah tetapi kurikulum yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Insan Mulia semuanya mengacu kepada Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Bacaan Shalat, Doa – Doa sehari – hari dan Tuntunan – Tuntunan Ibadah yang lainnya tidak ada satu pun yang tidak bersemangatkan arruju ila al-Qur’an wa Sunannah assahihah yang merupakan nafas dari Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Selain itu para santri pun diberikan pemahaman tentang Ketauhidan yang murni sebagai bentuk pelurusan terhadap aqidah keluarganya yang terkadang menyimpang karena terbiasa melakukan sembah saji mengikuti tradisi nenek moyangnya, seperti melakukan ritual di bawah pohon dengan kemenyan atau mengundang arwah – arwah saat hendak melakukan Jatilan. Dan yang tidak kalah pentingnya pra santri pun didorong untuk melakukan dakwah dengan cara mempertanyakan Shalat kepada kedua orang tuanya apabila tidak menjalankan Shalat Lima waktu, mengingat di sekitar kampung Plakaran mayoritas orang tua tidak menjalankan shalat Lima waktu. Selama ini proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Insan Mulia tidaklah dibebankan kepada orang tua santri, pendanaan yang diperuntukkan untuk biaya operasional, seperti surat menyurat, kartu kendali belajar, gaji tenaga pengajar, biaya listrik, biaya kebersihan, dan penyewaan seluruh gedung berasal dari donator tetap Ibu. Hj. Rohani pemilik beberapa perusahaan seperti perusahaan; eksportir, migas, beberapa rumah makan, dan pemilik saham di beberapa perusahaan lainnya. Proses belajar mengajar dilaksanakan setiap hari kecuali hari jum’at yang dimulai dari jam 15.00 – 18.00. Kurikulum di Pondok Pesantren Insan Mulia terdiri dari Membaca Iqra, Membaca Al-Qur’an, Hapalan Surat-surat Pendek, Hapalan Doa Sehari-hari, dan Tahfidz Al-Qur’an. Selain itu secara rutin setiap hari minggu diadakan latihan Tapak Suci yang langsung mendatangkan tenaga pengajar dari perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah PDM Bantul.

Tabel.1 Pengeluaran Ponpes Insan Mulia

No	Kebutuhan Rutin Per Bulan	Jumlah Dana	Sumber Dana
1	Gaji Tenaga Pengajar	300.000x5= 1.500.00	Hj. Rohani
2	Gaji Pegawai Kebersihan	250.000	Hj. Rohani
3	Pembayaran Listrik	100.000	Hj. Rohani
4	Surat Menyurat dan Kearsipan	100.000	Kas Ponpes
Total		1.950.000 Per Bulan	
No	Kebutuhan Temporal	Jumlah Dana	Sumber Dana
1	Penyewaan Tanah Dan Gedung	75.000.000	Hj. Rohani
2	Kartu Kendali dan Sosialisasi	5.000. 000	Percetakan Andhy
3	Penyediaan Iqra dan Qur’an	1.000.000	Kas Pondok
4	Penyediaan White Board	1.000.000	Kas Pondok

5	Meja dan Karpets	2.500.000	Kas Pondok
6	Penyelenggaraan Khitanan	25.000.000	YAUMY ²
Total		109.500.000	

Sumber: Bendahara Ponpes Insan Mulia

Gambaran Penyelenggaraan Pendidikan

Pada awalnya proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Insan Mulia dilaksanakan secara terbatas dengan tenaga pengajar seadanya, diikuti oleh beberapa anak dari sekitar kawasan Kampung Plakaran Kidul, Desa Baturetno. Hampir satu bulan lamanya proses belajar mengajar berlangsung yang hanya diikuti oleh 15 santri. Di bulan Juni 2012, saat Pemilu Walikota Yogyakarta berlangsung, anak dari Pimpinan Pondok Pesantren (Ikmal Nur Muflih) yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY (Universitas Negrri Yogyakarta) berjumpa dengan Rijal Ramdani, mahasiswa MAP (Magister Administrasi Publik) UGM, dalam tim pemenangan salah satu pasangan. Kebetulan keduanya aktif di organisasi Pergerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bulaksumur dan Cabang Ar. Fakhruddin Kota Yogyakarta, dan pegiat di Kauman Institute, lembaga sayap tempat penyemaian dan ruang diskusi terbuka intelektual muda Muhammadiyah. Dalam perjumpaan itulah Ikmal Nur Muflih mengungkapkan kegelisahannya akan kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk mengurus pondok pesantren yang didirikan oleh orang tuanya.

Maka terdorong akan nilai-nilai semangat pemberdayaan masyarakat, atas penjelasan kondisi masyarakat di sekitar Plakaran, melalui nilai *al-Maun* yang dikumandangkan oleh Kyai Ahmad Dahlan, dan nilai-nilai transformasi sosial sebagai nilai dasar oleh Ahmad Rujal pun terpanggal untuk bergabung menjadi motor penggerak proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Insan Mulia yang mengusung ide-ide pembebasan Kyai Ahmad Dahlan. Karena merasa masih kekurangan SDM, dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk merekrut tenaga pengajar yang memiliki visi sama, Rijal pun mengajak temannya Sofwan Jamil, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang kebetulan merupakan adik kelasnya saat belajar di Pondok Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango Garut dan juga merupakan aktivis IMM Cabang Sleman Yogyakarta, untuk ikut terlibat mengajar.

Melalui ketiga aktivis IMM inilah untuk pertama kali konsep kurikulum sebagai acuan bahan ajar di Pondok Pesantren Insan Mulia digagas, dengan tetap mengacu kepada arahan Pimpinan Pondok Ust. Drs. H. Slamet Abdullah, MA. Maka tersusunlah struktur kepengurusan Pondok Pesantren dan Kurikulum pertama yang lebih menekankan pada aspek *Ibadah Mahdoh* dan Kemampuan Membaca al-Qur'an. Mengingat setelah hasil verifikasi dan pengecekan kemampuan membaca anak, didapati mayoritas anak masihlah belum bisa membaca al-Qur'an dan masihlah belum melaksanakan shalat lima waktu karena belum hapal bacaan-bacaan shalat dan lingkungan keluarga yang tidak melaksanakan shalat.

Tabel.2. Kurikulum Pertama Pondok

No	Kelas	Bahan Ajar	Tenaga Pengajar
1	1.a	Iqra 1 – Iqra 2	Mundoriyati
2	1.b	Iqra 3 – Iqra 4	Sofwan Jamil
3	2	Iqra 5 – Iqra 6	Rijal Ramdani
4	3	Al'qur'an	Ikmal Nur Muflih

Sumber: Bag. Kurikulum

Sebelum menyusun Kurikulum, dalam jangka waktu seminggu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Kampung Plakaran melalui surat undangan yang ditujukan kepada orang tua bahwa pondok Pesantren Insan Mulia akan mengadakan proses belajar mengajar agama secara gratis bagi anak-anak dengan difasilitasi oleh 4 tenaga pengajar, yaitu Ikmal Nur Muflih, Rijal Ramdani, Sofwan Jamil, dan Mundoriyati yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah Ust. Drs. H. Slamet Abdullah, MA. Selain itu secara langsung disosialisasikan juga oleh pimpinan pondok kepada orang tua akan pentingnya pendidikan agama Islam, baik melalui belajar membaca al-Qur'an maupun

melalui penanaman nilai-nilai akhlak. Dari hasil sosialisasi tersebut terjaring sebanyak 25 anak yang didaftarkan oleh orang tuanya untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Proses belajar mengajar pun berlangsung, anak mengikuti pembelajaran sesuai dengan kelas masing-masing, berfokus pada pembelajaran membaca Iqra yang disediakan oleh Pondok, melalui panduan Kartu Kendali Bacaan yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan bacaan anak—di dalamnya terdapat penilaian apakah bacaannya layak dilanjutkan atau tidak, ditambah dengan memandu anak-anak untuk menghafal bacaan shalat dan surat-surat pendek yang diperuntukkan saat shalat. Dimulai dari jam 03.30 setelah shalat ashar – jam 18.00 setelah shalat maghrib. Saat shalat magrib, anak-anak melaksanakan shalat secara mandiri dan berjamaah dengan imam salah satu dari mereka melalui bacaan shalat yang dikeraskan. Hal itu dimaksudkan supaya anak yang belum hafal bacaan shalat bisa menghafalnya dari pendengaran yang didengungkan secara bersama. Selain itu secara rutin di kelas setiap hari anak-anak dicek kualitas shalatnya sehari 5 kali, yang apabila shalatnya tidak lengkap akan mendapatkan hukuman harus menghafal surat-surat pendek secara mandiri.

Setelah berjalan hampir 5-8 bulan nampaklah perkembangan anak-anak yang sudah hafal bacaan shalat, beberapa doa sehari-hari, dan beberapa surat-surat pendek dari al-Qur'an. Selain itu mereka pun sudah bisa membaca Iqro padahal sebelumnya tidak pernah mengenal, dan beberapa di antara mereka sudah bisa membaca al-Qur'an juga sudah mampu menjaga shalat 5 kali dalam sehari. Tak jarang dengan perubahan kemampuan anak seperti itu mereka menjadi teladan di sekolah formalnya. Mak hal itu memicu gelombang berdatangnya orang tua anak di sekitar kawasan Gilang, Ironayan, Potorono, Ngipik, dan Kota Gede secara perlahan tapi pasti untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren. Sampai dengan jumlah anak yang terdaftar mencapai 95 anak dan saat usia pondok 1 tahun mencapai 115 anak.

Dengan membludaknya peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar dalam kapasitas tenaga pengajar yang hanya berjumlah 4 orang, ditambah dengan kesibukan 3 tenaga pengajar tersebut sebagai mahasiswa yang juga aktif di IMM, menjadikan proses belajar mengajar menjadi tidak kondusif dan tidak terkendali. Fasilitas yang disediakan pondok pun tidak memadai, kelas yang sempit, dan rentang waktu yang tersedia sangat terbatas, menjadikan perhatian terhadap anak tidak maksimal. Akhirnya sedikit demi sedikit anak-anak mengundurkan diri, hilang begitu saja, tidak mengikuti kembali proses belajar mengajar di Pondok. Maka atas kondisi seperti itu hasil dari refleksi yang secara rutin selalu diadakan oleh ke-3 tenaga pengajar di Kedai Kopi Janti, di setiap malam minggu, disimpulkan perlunya perubahan Kurikulum yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kemampuan anak yang beragam, perekrutan tenaga pengajar baru, penghentian penerimaan peserta didik baru, dan pembuatan kalender ajar selama 1 tahun.

Tabel.2 Jadwal Pengajar dan Bahan Ajar

JADWAL PENGAJAR PONDOK PESANTREN INSAN MULIA					
NO	HARI	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV
Jumlah Peserta		20 Anak	17 Anak	18 Anak	20 Anak
1	Sabtu	Mundoriyati	Rijal Ramdani	Sofwan Jamil	Muliatul Fajri
2	Minggu	Mundoriyati	Ikmal Nur Muflih	Sofwan Jamil	Muliatul Fajri
3	Senin	Mundoriyati	Muliatul Fajri	Sofwan Jamil	Rijal Ramdani
4	Selasa	Mundoriyati	Muliatul Fajri	Sofwan Jamil	Ikmal Nur Muflih
5	Rabu	Mundoriyati	Rijal Ramdani	Muliatul Fajri	Ikmal Nur Muflih
6	Kamis	Mundoriyati	Rijal Ramdani	Muliatul Fajri	Ikmal Nur Muflih

Maka tersusunalah kurikulum baru, melalui pemecahan kelas menjadi 4 kelas, menambahkan kegiatan Tapak Suci di hari Minggu pagi, dan berhasil direkrutnya tenaga pengajar baru Muliatul Fajri Akhsan, S.H.I, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang juga aktivis dakwah yang sebelumnya telah mengikuti sekolah tahfid (menghapal Al'Qur'an) di salah satu pondok pesantren di Surakarta. Adapun untuk kalender akademiknya diputuskan penerimaan peserta didik hanya dilakukan di Bulan Januari dan di Bulan Juli. Pengetatan dilakukan dengan akan mencoret peserta didik yang jarang masuk mengikuti proses belajar mengajar. Dan tersaringlah peserta didik yang aktif sebanyak 75 anak. Jadwal mengajar pun dimungkinkan bagi pengajar untuk bisa lebih banyak berkemampuan mengikuti aktivitas di organisasi pergerakan karena dalam satu minggu hanya mengajar selama 4 hari.

MATERI DAN BAHAN AJAR					
NO	HARI	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV
1	Sabtu	Iqra 1-2	Iqra 2-3 + Menulis	Iqra 4-6 + Menulis	Hapalan Juz'ama ³
2	Minggu	Iqra 1-2	Iqra 2-3	Iqra 4-6	Hapalan Juz'ama
3	Senin	Iqra 1-2	Bacaan Shalat	Iqra 4-6 + Menulis	Baca Qur'an
4	Selasa	Iqra 1-2	Hapalan Juz'ama ⁴	Iqra 4-6 + Imla	Baca Qur'an
5	Rabu	Iqra 1-2	Iqra 2-3 + Menulis	Hapalan Juz'ama ⁵	Baca Qur'an
6	Kamis	Iqra 1-2	Iqra 2-3	Hapalan Juz'ama	Baca Qur'an

Sumber: Bag. Kurikulum

Selain itu karena prihatin dengan mayoritas anak laki-laki yang belum dikhitkan, padahal usia anak sudah mendekati usia baligh (usia berlakunya syariat agama) tapi di sisi lain orang tuanya tidak mampu untuk melaksanakan khitan maka atas inisiatif bersama digagaslah untuk menyelenggarakan khitanan bersama. Terbentuklah kepanitian yang bertugas untuk menjadi fasilitator program dan pencarian Dana. Dan pada Bulan Juli 2012 saat anank-anak SD sedang libur diselenggarakanlah Khitanan Bersama atas kerjasama Pondok Pesantren Insan Mulia, Yayasan Amal Usaha Muslim Yogyakarta (YAUMY), dan Percetakan Andhy yang diikuti oleh 28 peserta khitanan, tidak hanya bagi anak yang belajar di Pondok Pesantren Insan Mulia tetapi juga diikuti oleh anak-anak di sekitar Kabupaten Bantul secara umum. Ditambah dengan digabungkannya kegiatan Cabang Pemuda Muhammadiyah Cabang Banguntapan Utara yang setiap 2 minggu sekali mengadakan kajian di Pondok Pesantren dan Program Ibu-Ibu Arisan jemaat pengajian malam Jum'at dari sekitar kawasan Potorono dan Baturetno Bangntapan, Bantul.

³ At-Tariq – Juz'29

⁴ An-Nas – Al-Humazah

⁵ Al-Asr – Al'Ala

Sehari-hari, pembelajaran di Pondok Pesantren Insan Mulia, dilaksanakan dalam suasana santai. Pertama-tama, anak-anak dipersilahkan membaca doa sebelum belajar, kemudian melakukan murojaah (menghapal ulang) surat-surat pendek dengan dilagukan, barulah anak dipandu untuk membaca Iqra atau Al'qur'an di papan tulis untuk kemudian mengaji bersama masing-masing sesuai dengan batas bacaannya. Di akhir satu per satu menghadap ustad untuk melakukan pengecekan apakah bacaan mereka sudah benar atau belum. Setelah itu istirahat atau biasanya dengan dipandu ustad anak-anak bermain di pinggir sungai sambil menghapal surat-surat pendek atau bacaan shalat sampai andzan maghrib berkumandang. Di waktu-waktu tertentu, pondok Pesantren Insan Mulia pun

menjadi fasilitator dari siswa SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta yang melakukan kegiatan *social worker* berupa penanaman pohon dan melakukan kunjungan terhadap masyarakat kurang mampu di sekitar kawasan Baturetno dan Potorono. Selain itu secara rutin setiap bulan ramadhan Pondok Pesantren Insan Mulia menjadi fasilitator penyaluran Zakat Mal dari perusahaan-perusahaan Ibu. Hj. Rohani dengan kisaran zakat mencapai 15-20 juta untuk masyarakat di sekitar Plakaran Kidul dan Lor.

Kepedulian Civil Society

Jika dipetakan, ada tiga actor penting yang berperan dari kemunculan kekuatan civil society melalui institusi kelembagaan Pondok Pesantren Insan Mulia yang menyelenggarakan pendidikan agama kepada anak-anak usia dini. *Pertama*, Ust. Drs. Haji Slamet Abdullah, MA sebagai inisiator, pendiri dan Pimpinan Pondok yang brlatar belakang sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah. *Kedua*, Ibu Hj. Rohani, sebagai donator penyandang dana tetap yang mendukung terhadap seluruh kebutuhan prosos belajar mengajar pondok. Dan *Ketiga*, para tenaga pengajar dengan berlatar belakang mahasiswa dan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang menjadi motor dari terselenggaranya proses belajar mengajar dan mensukseskan seluruh program social pondok pesantren.

Dilihat dari sisi inisiator Ust. Drs. H. Slamet Abdullah, MA, keberangkatan gagasaannya yang melihat secara besar kondisi kepemimpinan bangsa yang sudah rusak dengan memudarnya semangat nasionalisme dan merebaknya praktek korupsi baik yang dilakukan oleh elite politik maupun pejabat birokrasi, juga atas keprihatinnya terhadap kondisi masyarakat yang terombang-ambing dengan mudahnya untuk disuap saat pemilihan umum dan memudarnya sikap toleransi dalam kebersamaan yang lebih cenderung mengedepankan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, tidak terlepas dari latar belakangnya sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantul yang pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Periode 2004-2009. Dengan latar belakang PAN sebagai partai pengusung demokrasi pasca runtuhnya rezim orde baru melalui gerakan reformasi tentunya hal itu akan menjadi nilai dasar yang mempengaruhi terhadap kepribadian dan pandangan kebangsaan kadernya⁶.

Sementara pendidikan agama yang dipilih sebagai solusinya, dan gagasan pemberdayaan kualitas moral masyarakat melalui jalur momotong generasi muda (anak-anak), tidak terlepas dari latar belakang Ust. Drs. H. Slamet Abdullah, MA sebagai sekretaris

⁶ Berdasarkan Hasil obrolan (wawancara) yang sering penulis lakukan dalam kesempatan-kesempatan tertentu.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan, *da'i* Muhammadiyah dengan jangkauan jemaah yang begitu luas di sekitar DIY, dan juga sebagai tenaga pengajar di SMA 2 Muhammadiyah Yogyakarta. Nilai-nilai yang dianut Muhammadiyah sebagai garis pergerakan organisasi lebih cenderung menjadikan pendidikan sebagai alat dalam melakukan upaya perubahan social. Selama ini Muhammadiyah telah dikenal sebagai bagian dari kekuatan civil society yang konsen melakukan upaya penyelenggaraan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya wajar bila kurikulum pendidikan di pondok pun banyak mengacu kepada paktek-praktek keagamaan yang dikodifikasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Himpunan Putusan Tarjih (HPT).

Dan adapun institusi pondok pesantren yang dipilih sebagai alatnya tidak terlepas dari latar belakang beliau yang berasal dari Temanggung Jawa Tengah dimana Orang Tuanya merupakan guru ngaji dengan menjadikan rumahnya sebagai tempat mengaji bagi anak-anak yang berada di kampungnya. Begitupun dengan istri beliau, Drs. Hj. Nuril Mutiah, MA yang berasal dari keluarga Pondok Pesantren Nahdatul Ulama (NU) di Jawa Timur. Dimana bagi kalangan Nahdiyyin (orang NU) seseorang yang memiliki pondok pesantren akan memiliki kedudukan yang lebih dihormati di tengah-tengah masyarakat dalam status sosialnya. Pimpinan pondok akan dengan sendirinya memiliki gelar *Kyai* (kehormatan) dan istri pimpinan pondok akan menjadi *Nyai* (ibu bersama).

Dilihat dari sisi penyandangan donasinya, Ibu Hj. Rohani, merupakan pengusaha sukses dengan kepemilikan beberapa perusahaan, rumah makan, dan pemilik saham yang sangat taat dengan nilai-nilai agama. Perkenalan beliau dengan Ust. Drs. H. Slamet Abdullah, MA terjadi saat beliau menjadi Jemaah dari pengajian yang kebetulan Ust. Drs. H. Slamet Abdullah, MA sebagai penceramahnya. Nilai-nilai agama yang mendorong pemeluknya untuk peka dan peduli terhadap sesama menjadikannya tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana sebesar apapun bagi kegiatan-kegiatan social, pendidikan, dan keagamaan. Seperti dalam hari tertentu di rumahnya diadakan pengajian umum. Selain mendanai pondok pesantren Insan Mulia beliau pun menjadi donator utama untuk salah satu pondok pesantren lainnya di Piyungan Jl. Wonosari, dan juga secara rutin menyalurkan donasinya ke Pondok Pesantren Alhikmah yang mengurus pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin tingkat SMP dan SMK di Kec. Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Saat nilai agama berjumpa dengan kekayaan berada dalam satu kepribadian maka kekayaan yang dimilikinya pun akan terdistribusikan terhadap manusia-manusia di sekitarnya yang membutuhkan. Terakhir dilihat dari sisi tenaga pengajarnya yang merupakan mahasiswa dan aktivisi organisasi pergerakan IMM. Memungkinkan untuk terpanggil melakukan pendampingan langsung terhadap masyarakat, memiliki mobilitas dan semangat yang tinggi, dan rela untuk mengesampingkan nilai-nilai berbentuk materi. Nilai-nilai transformasi social yang dikumandangkan Koentowijoyo di dalam Paradigma Islam sebagai basis dari nilai perjuangan IMM yang menghendaki kadernya untuk bisa berperan aktif melakukan upaya perubahan social di tengah-tengah masyarakat dengan berusaha mengambil peran-peran yang tidak dilakukan Negara yang menjadi dasar pendorongnya. Ditambah dengan perubahan paradigma gerakan mahasiswa yang secara hirarki organisasional kepalanya sudah dipegang oleh kekuatan politik tertentu mendorong aktivis pergerakan saat ini untuk lebih memilih wilayah-wilayah pinggiran sebagai bentuk aktualisasi perjuangannya. Begitupun dengan latar belakang ketiganya yang sekalipun sebagai mahasiswa di fakultas-fakultas ilmu social tetapi pernah mengancam pendidikan pondok pesantren tentunya memberikan kemampuan untuk mengajar dalam pelajaran-pelajaran agama dasar.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hubungan Negara dengan kekuatan civil society dalam kasus ini terjadi dalam hubungan assosional atau kolaboratif, karena satu sama lain saling menguntungkan. Rusaknya tatanan social yang disinyalir merupakan dampak dari minimnya pendidikan agama di dalam kurikulum pendidikan umum menjadi factor pendorong kekuatan civil society untuk mengambil peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kekuatan civil society yang termanifestasi melalui Pondok Pesantren kehadirannya tidak terlepas dari kegelisahan seseorang yang memiliki jaringan untuk menyatukan semua potensi yang ada, baik gagasan, modal, maupun SDM sehingga bisa terlembagakan. Latar belakang seseorang yang memotori dan menggerakkan kekuatan civil society tidak terlepas dari nilai-nilai yang dianut dan mata rantai hubungan genetic dengan *culture* di masa lalunya.

Dalam sudut pandang Kemuhammadiyah, aktualisasi perjuangan yang dilakukan mampu bermetamorfosis, sehingga sekalipun tidak ada brand Muhammadiyah di dalam institusi pendidikannya tetapi nilai-nilai Muhammadiyahlah yang menjadi pendorong, penggerak dan yang diajarkannya. Selama ini kebanyakan institusi pendidikan Muhammadiyah lebih mengedepankan brand Muhammadiyah padahal tidak menggunakan nilai-nilai Kemuhammadiyah, dengan harga yang sangat mahal dan hanya bisa diakses oleh kelas Menengah dan atas saja, Muhammadiyah hanya tampak secara formal tidak secara substansial yang membebaskan. Sementara Pondok Insan Mulia sekalipun tidak nampak seperti institusi Muhammadiyah tetapi mampu melaksanakan spirit Muhammadiyah dengan menggeratkan biaya pendidikan dan memberikan fasilitas-fasilitas kerelawanan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsaruddin, Asma. Tt. *The Philosophy of Islamic Education: Classical Views and M. Fethullah Gulen's Perspective*. (<http://gulenconference.net.pdf>)
- Anjum, Tanvir. -From Confrontation to Collaboration: Contemporary Discourse on the State-Civil Society Relational Models|. *Journal Of Political Studies*. 2007.
- Alko-Cobbah, Alberth. -Civil Society and Good Governance: Challenges to Public Libraries in South Afrika. | *Libraries Review*. Vol. 55 No. 6. 2006.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamm, Muhammad, Ibrahim. Islamic Perspective of Education and Teachers. *European Journal of Social Sciences*. Vol. 30. No.2 (2012), pp. 223-235.
- Krina P, Lalola, Lolina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance: BAPPENAS.
- Muhammad, Fadel. 2007. *Signifikansi Peran Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Propinsi Gorontalo*. Disertasi: Ilmu Administrasi Negara UGM.
- Pabutinggi, Mochtar. 2001. *Dimana Berkiprah, Dimana Sekarat Menyikap Sumber Tiadanya Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia*. Dalam -Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. | BAPPENAS.
- Rizvi, Sayyid, Muhammad. -Education in Islam: *Paper presented at the First Annual Confrence of the Ahlu L-baith Assembly of North America. Ocotober 12-13, 1993. Toronto, Canada*.
- Sofian. Effendi. 2005. *Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama*. Yogyakarta: TP.
- Tandon, Rajesh and Mohanty, Ranjita. -Does Civil Society Matter?: Governance in Contemporary India. | *Pacific Affair: Fall 2004: 77,3*.
- UNDP. (Tt). *Good Governance And Sustainable Human Development*. Tk: Tp.
- Usman, Sanyoto. 2001. *Peran Civil Society (Masyarakat Madani) Dalam Tata Pemerintahan*. Dalam -Membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. | BAPPENAS.